

## **Materi perkuliahan Kedua :**

1. Perkembangan Penduduk, Masyarakat, Sda, Lingkungan, Teknologi, kebudayaan dan ruang lingkup Internasional

Tugas dikerjakan berkelompok (dijilid rapi), sumber bacaan / narasi wajib di buat di *footnote*, dikumpul dan dipresentasikan dalam bentuk *power point*, pada tgl. 10/10/2011, saat jam perkuliahan.

Bantulah diri anda sendiri untuk lulus dengan membuat tugas + belajar dengan baik + aktif kuliah.

Selamat Belajar.

SUCCESS CAN BE ANOTHER FORM OF FAILURE, IF WE FORGET WHAT OUR

### PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Sebagai langkah pertama, Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara (PAN) telah mengadakan rapat Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pencegahan Pencemaran pada tahun 1971. Contohnya yaitu : seminar menjelang Konferensi Stockholm tentang “Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional” di Bandung, yang berlangsung dari tgl. 15-18 mei 1972. Dan setelah Konferensi Stockholm, pemerintah RI membentuk Panitia Interdepartemental, “Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi Pemerintah di Bidang Pengembangan Lingkungan Hidup berdasarkan Keppres No. 16/1972, yang diketuai oleh MenPan/wakil Ketua Bappenas dan sekretariat di LIPI. Produknya adalah Program Pembangunan Lingkungan dalam wujud Bab 4 dalam Repelita II (1974-1979) berdasarkan butir 10 Pendahuluan Bab III GBHN 1973 – 1978, yang menggariskan Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**(K-1/2/3/4/5: Uraikan Produk Program Pembangunan Lingkungan yang dimaksud tersebut).**

Keppres No. 27 Tahun 1975 membentuk Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam, untuk dijadikan dasar penentuan kebijakan kedepan.

Dalam Kabinet Pembangunan III, IV dan V, diangkat Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH), Prof. Dr. Emil Salim, guru besar Ekonomi UI, dengan tata kerjanya dalam Keppres No. 28 Tahun 1978, yang disempurnakan dengan Keppres No. 35 Tahun 1978.

Kabinet Pembangunan IV (1983-1988), V (1988 -1993) istilah PPLH menjadi Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Tugas pokoknya tertuang dalam Keppres No. 25 Tahun 1983.

**(K-1/2/3/4/5: Terangkan kandungan dalam Ketiga Keppres tersebut)**

Kabinet Pembangunan VI (1993–1998) Menteri Negara Lingkungan Hidup diganti Ir. Sarwono Kusumaatmadja dan Kabinet Pembangunan VII (1998) diganti Prof. Dr. Yuwono Sudarsono. Dalam Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999) diangkat dr. Panangian Siregar. Dalam Kabinet Persatuan Nasional (1999-2001) diganti Dr. Sonny Keraf. Dan dalam Kabinet Gotong Royong (2001-2004) diganti Nabeli Makarim M.P.A.,M.S.M. dalam Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2009) diganti Ir. Rachmat Witoelar.

**(K-1/2/3/4/5: Terangkan Kinerja yang dihasilkan para Menteri pada masa jabatannya)**

## MASALAH :

Dampak dari perkembangan menimbulkan tantangan permasalahan yang dipengaruhi oleh Empat faktor pokok yaitu :

1. Perkembangan Penduduk dan Masyarakat;
2. Perkembangan Sumber Alam dan Lingkungan;
3. Perkembangan Teknologi dan Kebudayaan;
4. Perkembangan Ruang Lingkup Internasional.

**(K-1/2/3/4/5: Jelaskan Pengertian dari ke-empat pokok permasalahan tersebut dan berikan masing-masing 3(tiga) contoh yang terjadi saat ini)**

Dengan tidak adanya lagi GBHN setelah tahun 2004, Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009, yang ditetapkan pada tgl.19 januari 2005 mulai berlaku berdasarkan Pasal 19 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tertanggal 5 Oktober 2004.

Ketentuan tentang pengelolaan lingkungan hidup tercantum dalam Bab 32 tentang Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) tersebut dikemukakan permasalahan pokok sbb:

1. Terus menurunnya kondisi hutan Indonesia;
2. Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS);
3. Habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak;
4. Citra pertambangan yang merusak lingkungan;
5. Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati (*biodiversity*);
6. Pencemaran air semakin meningkat;
7. Kualitas udara, khususnya dikota-kota besar, semakin menurun;
8. Sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan belum optimal dilaksanakan;
9. Pembagian wewenang dan tanggung-jawab pengelolaan hutan belum jelas;
10. Lemahnya penegakan hukum terhadap pembalakan (*illegal logging*) dan penyeludupan kayu;
11. Rendahnya kapasitas pengelolaan kehutanan;
12. Belum berkembangnya pemanfaatan hasil hutan non kayu dan jasa-jasa lingkungan;
13. Belum terselesainya batas wilayah laut dengan negara tetangga;
14. Potensi kelautan belum didayagunakan secara optimal;
15. Merebaknya pencurian ikan dan pola penangkapan ikan yang merusak;
16. Pengelolaan pulau-pulau kecil belum optimal;
17. Sistem mitigasi bernuansa alam belum dikembangkan;
18. Kektidakpastian hukum di bidang pertambangan;
19. Tingginya tingkat pencemaran dan belum dilaksanakannya pengelolaan limbah secara terpadu dan sistematis;
20. Adaptasi kebijakan terhadap perubahan iklim (*climate change*) dan pemanasan global (*global warming*) belum dilaksanakan;
21. Alternatif pendanaan lingkungan belum dikembangkan;
22. Isu lingkungan global belum diterima dan diterapkan dalam pembangunan nasional dan daerah;
23. Belum harmonisnya peraturan per-UUan Lingkungan Hidup;

24. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.

**(K-1/2/3/4/5: Berikan contoh pada ke dua puluh empat permasalahan pokok diatas).**

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah adanya keseimbangan yang bersifat *sustainable development*. Seluruh kegiatannya harus dilandasi tiga pilar pembangunan secara seimbang yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viabel*), diterima secara sosial (*socially acceptable*) dan ramah lingkungan (*environmentally sound*).

**(K-1/2/3/4/5: Jelaskan pengertian *sustainable development* dan berikan contoh)**

Sasaran pembangunan lingkungan hidup mengarah pada masalah: Air, pencemaran pantai, udara, sampah, limbah B3, kerusakan lingkungan, memelihara SDA... dll.

Kegiatan pokok *Good Environmental Governance* (tata kelola lingkungan hidup yang baik) meliputi : Pengkajian dan analisis Sda secara berkelanjutan; Peningkatan kesadaran tripartiet dalam pengelolaan Sda; Pengembangan dan Penegakan peraturan per-UUan lingkungan hidup yang bersifat berkelanjutan, ... dll.

Masalah lingkungan yang disebabkan oleh:

1. Perkembangan ilmu;
2. Teknologi;
3. Persoalan ekonomi;
4. Cara pandang manusia/ philosphinya;
5. Perubahan sosial, gejala sosial;

**(K-1/2/3/4/5: Berikan contoh kasus pada kelima *statement* diatas)**